



## **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Dra. Widiati, MS., M.AP<sup>1\*</sup>, & Vera Verlina, S.Sos., M.AP<sup>2</sup>**

<sup>\*1&2</sup> Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Ahmad Yani Banjarmasin

\*e-Mail: [widiatiw61@gmail.com](mailto:widiatiw61@gmail.com)

Submit Tgl: 05-Desember-2025

Diterima Tgl: 07-Desember-2025

Diterbitkan Tgl: 08-Desember-2025

***Abstract:** This study aims to evaluate the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in addressing the poor in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. The BPNT program is a transformation from conventional food assistance to non-cash assistance that aims to improve the effectiveness, efficiency, and accuracy of targeting social assistance. This study uses a qualitative approach with an evaluative method, and data collection techniques are conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies of program implementers, social facilitators, e-warungs, and Beneficiary Families (KPM). The results show that BPNT has generally reached the right targets and provided benefits in reducing the burden of food expenses for poor families, especially the poor. However, various problems remain in its implementation in the field, such as varying commodity quality, delays in disbursement, and the suboptimal role of social facilitators due to limited resources. In addition, there are also problems in updating DTKS data that cause inaccurate targeting, both in the form of incorrect exclusion and inclusion. The BPNT program has also not been optimally integrated with economic empowerment programs, so its impact is still short-term and not significant in encouraging the independence of beneficiary families. Therefore, a comprehensive evaluation and improvement of the BPNT implementation system at the local level is an important step so that this program can become an effective instrument in alleviating extreme poverty in a sustainable manner in Banjarbaru City.*

***Keywords:** Policy Evaluation; Non-Cash Food Assistance; Poor; Banjarbaru City*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan fakir miskin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Program BPNT merupakan transformasi dari bantuan pangan konvensional menjadi bantuan berbasis non tunai yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaksana program, pendamping sosial, e-warung, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT secara umum telah menjangkau sasaran yang tepat dan memberikan manfaat dalam mengurangi beban pengeluaran pangan keluarga miskin, khususnya kelompok fakir miskin. Namun, masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan, seperti kualitas komoditas yang bervariasi, keterlambatan pencairan, serta belum optimalnya peran pendamping sosial karena keterbatasan sumber daya. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam pemutakhiran data DTKS yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk eksklusi maupun inklusi yang salah. Program BPNT juga belum terintegrasi secara optimal dengan program

pemberdayaan ekonomi, sehingga dampaknya masih bersifat jangka pendek dan belum signifikan dalam mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem implementasi BPNT di tingkat lokal menjadi langkah penting agar program ini dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; Bantuan Pangan Non Tunai; Fakir Miskin; Kota Banjarbaru

**Cara mengutip** Widiati, & Verlina, V. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 123–134. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1557>

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak (Harati, 2025). Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai strategi dan program untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut Soeratin & Mayuri, (2025) Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial berbasis bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pangan. BPNT diluncurkan sebagai transformasi dari program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) ke bentuk yang lebih modern, efisien, tepat sasaran, dan mampu memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pelaku ekonomi lokal. Kota Banjarbaru sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi dinamika sosial ekonomi yang cukup kompleks. Di tengah pembangunan kota yang pesat, masih terdapat kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori fakir miskin, yakni mereka yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Fakir miskin di Kota Banjarbaru tersebar di berbagai kelurahan dan umumnya menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk. Oleh karena itu, kehadiran Program BPNT menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan mendorong kesejahteraan masyarakat bawah.

Kebijakan BPNT memiliki skema penyaluran yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Bank penyalur (Himpunan Bank Negara/Himbara), e-warong (elektronik warung gotong royong), hingga pendamping sosial. Melalui kartu elektronik, KPM dapat membeli bahan pangan seperti beras dan telur di e-warong yang telah ditentukan (Ogot et al., 2024). Secara teoritis, kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi KPM. Manfaat langsung berupa ketersediaan pangan bergizi, sedangkan manfaat tidak langsung mencakup peningkatan kemandirian ekonomi melalui mekanisme transaksi non tunai, pengurangan kebocoran bantuan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Dalam menilai efektivitas BPNT, teori kebijakan publik menjadi kerangka penting. Salah satu teori yang relevan digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas,

dan ketepatan (Agustina & Megawati, 2022). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya dan berdampak pada sasaran yang dituju. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis secara menyeluruh implementasi BPNT di lapangan, serta hambatan dan peluang perbaikannya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan dalam konteks evaluasi BPNT di berbagai daerah. Penelitian oleh Ningtyas, (2023) mengenai pelaksanaan BPNT di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap konsumsi pangan rumah tangga miskin, meskipun masih ditemukan kendala dalam pendistribusian bantuan dan kualitas komoditas. Penelitian dari Firdausi & Hertati, (2022) di Kabupaten Cirebon menekankan bahwa keterlibatan e-warong sebagai pelaku utama dalam distribusi memerlukan pengawasan ketat karena adanya potensi monopoli dan ketidaksesuaian harga pasar. Selanjutnya, penelitian oleh Nauval & Suparti, (2024) di Kota Tangerang menyoroti lemahnya kapasitas pendamping sosial dalam memberikan edukasi kepada KPM, sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme BPNT. Sementara itu, Purnama et al., (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Lombok Timur menemukan bahwa meskipun BPNT telah menjangkau sebagian besar fakir miskin, namun indikator efektivitas kebijakan masih rendah karena belum ada integrasi yang kuat antara data penerima dan kondisi riil di lapangan. Adapun penelitian dari Yana et al., (2022) di Kota Makassar menekankan pentingnya digitalisasi sistem penyaluran untuk mengurangi praktik pungli dan meningkatkan akuntabilitas. Dari lima penelitian tersebut, terlihat bahwa fokus evaluasi umumnya berkisar pada efektivitas penyaluran bantuan, kualitas komoditas, peran pendamping sosial, serta pengawasan terhadap e-warong. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik membedah kebijakan BPNT dalam konteks penanganan fakir miskin sebagai entitas sosial yang membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan masyarakat miskin secara umum. Penelitian-penelitian sebelumnya juga cenderung melihat BPNT dari perspektif operasional teknis, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dampaknya terhadap upaya penanganan kemiskinan struktural.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan BPNT secara administratif, tetapi juga menempatkan BPNT sebagai instrumen kebijakan dalam skema besar penanggulangan fakir miskin di Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, penelitian ini mengkaji sejauh mana BPNT telah menjawab persoalan fakir miskin, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar maupun dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada integrasi antara evaluasi implementasi program dengan analisis dampak sosialnya terhadap kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi mengingat pentingnya perbaikan kebijakan sosial di daerah, terutama dalam memastikan bahwa program bantuan yang dibiayai oleh anggaran negara benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang berkelanjutan. Kota Banjarbaru sebagai kota administratif yang sedang berkembang, memerlukan data dan temuan empiris sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan sosial ke depan. Selain itu, dinamika sosial ekonomi yang terus berubah menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, inflasi, dan tantangan pangan global.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam konteks penanganan fakir miskin di Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan Selatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan program BPNT, mengevaluasi dampak program terhadap kehidupan fakir miskin, menilai peran lembaga pelaksana dan pendamping sosial dalam distribusi bantuan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan capaian program di masa mendatang. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan Pemerintah Kota Banjarbaru dan pemangku kepentingan lainnya memiliki referensi empiris yang kuat dalam melakukan reformasi kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan basis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang sangat diperlukan dalam tata kelola program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Dengan mengevaluasi pelaksanaan BPNT secara holistik, termasuk peran aktor kebijakan dan dampak sosialnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem bantuan sosial di Indonesia secara umum, dan di Kota Banjarbaru secara khusus. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan akademik untuk pengembangan model kebijakan bantuan sosial yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi evaluatif yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan fakir miskin di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai proses, dinamika, serta dampak implementasi kebijakan secara kontekstual di lapangan (Jaya, 2020). Penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi antar pelaku kebijakan, termasuk pemerintah, pendamping sosial, pelaku *e-warong*, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dianalisis untuk mengungkap bagaimana kebijakan BPNT dijalankan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana program ini mampu menjangkau dan memberi manfaat bagi fakir miskin sebagai kelompok sasaran utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas pejabat Dinas Sosial Kota Banjarbaru, pendamping sosial BPNT, pengelola *e-warong*, dan sejumlah KPM yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam program serta kemampuan memberikan informasi yang relevan. Observasi dilakukan di sejumlah *e-warong* dan lingkungan tempat tinggal KPM untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi distribusi bantuan dan penerimaan program di tingkat akar rumput. Dokumentasi kebijakan, laporan pelaksanaan, dan data DTKS juga dianalisis untuk menguatkan temuan lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan dan kendala implementasi BPNT serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan sejumlah temuan penting terkait implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan fakir miskin di Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kebijakan, diketahui bahwa program ini telah berjalan secara umum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan baik pada aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, maupun ketepatan sasaran. Dinas Sosial Kota Banjarbaru mencatat bahwa terdapat 1.713 keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang tersebar di lima kelurahan yang menjadi fokus penelitian, yakni Kelurahan Guntung Manggis, Loktabat Selatan, Sungai Besar, Cempaka, dan Syamsudin Noor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.533 KPM terverifikasi sebagai kategori fakir miskin berdasarkan padanan data DTKS dan verifikasi lapangan. Untuk memberikan gambaran kuantitatif terhadap temuan lapangan, berikut disajikan tabel yang menunjukkan jumlah KPM terdata, jumlah fakir miskin yang terverifikasi, tingkat ketepatan waktu penerimaan bantuan, kualitas komoditas yang diterima, serta proporsi transaksi yang dilakukan melalui *e-warong* di masing-masing kelurahan.

**Tabel 1. Jumlah KPM Terdata, Fakir Miskin Terverifikasi, Tingkat Ketepatan Waktu Penerimaan Bantuan, Kualitas Komoditas melalui *e-warong***

Kelurahan	Jumlah KPM Terdata	Fakir Miskin Terverifikasi	Penerima BPNT Tepat Waktu (%)	Kualitas Komoditas Layak (%)	Transaksi di E-Warong (%)
Guntung Manggis	312	245	87%	90%	100%
Loktabat Selatan	427	398	91%	88%	95%
Sungai Besar	389	342	85%	84%	97%
Cempaka	275	260	78%	80%	92%
Syamsudin Noor	310	288	83%	82%	94%

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Kota Banjarbaru relatif cukup baik dari sisi ketepatan sasaran dan efisiensi penggunaan sistem non tunai. Kelurahan Loktabat Selatan dan Sungai Besar menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dalam verifikasi fakir miskin dengan proporsi lebih dari 90% dari total KPM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan validasi dan pembaruan data di dua wilayah tersebut berjalan lebih efektif dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Ketepatan waktu dalam penerimaan BPNT berkisar antara 78% hingga 91%, yang menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam proses pencairan bantuan yang kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan transfer dana, gangguan teknis, atau masalah koordinasi antara bank penyalur dan pendamping sosial. Dari sisi kualitas komoditas, lebih dari 80% KPM menyatakan bahwa beras dan telur yang diterima memiliki kualitas yang layak konsumsi. Namun, masih terdapat keluhan dari sebagian kecil penerima bantuan, khususnya di Kelurahan Cempaka dan Syamsudin Noor, mengenai telur yang busuk atau beras yang berdebu. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap proses pengadaan dan distribusi komoditas oleh *e-warong*. Dalam hal pelaksanaan transaksi melalui *e-warong*, hampir seluruh wilayah telah



mencapai tingkat transaksi di atas 90%, yang menunjukkan bahwa KPM telah terbiasa menggunakan sistem transaksi non tunai dengan kartu elektronik. Temuan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam aspek literasi digital dan keuangan dasar di kalangan keluarga miskin.

Namun, hasil observasi dan wawancara juga menemukan adanya monopoli penyaluran oleh beberapa *e-warong* di wilayah tertentu, yang menyebabkan terbatasnya pilihan bahan pangan serta memunculkan ketergantungan pada satu penyedia. Beberapa KPM mengaku tidak memiliki alternatif untuk memilih toko lain karena hanya satu *e-warong* yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan bank penyalur. Di samping itu, terdapat kesenjangan dalam pelayanan antar *e-warong*. Misalnya, *e-warong* di Loktabat Selatan diketahui memiliki fasilitas yang lebih baik dan pelayanan yang lebih cepat dibandingkan dengan *e-warong* di Sungai Besar atau Cempaka, yang masih mengalami antrean panjang dan keterlambatan logistik. Pendamping sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan BPNT, terutama dalam proses edukasi KPM dan verifikasi data. Namun, dari hasil wawancara ditemukan bahwa rasio pendamping sosial terhadap jumlah KPM masih belum ideal. Rata-rata satu pendamping harus menangani lebih dari 300 KPM, yang berdampak pada keterbatasan waktu dalam melakukan pemantauan secara rutin. Selain itu, pelatihan dan kapasitas teknis pendamping sosial dalam memanfaatkan data dan teknologi informasi masih terbatas. Dalam beberapa kasus, pendamping tidak memahami perbedaan antara KPM miskin dan fakir miskin, sehingga proses validasi menjadi kurang akurat.

Analisis terhadap efektivitas program menunjukkan bahwa BPNT telah mampu mengurangi beban pengeluaran pangan pada rumah tangga fakir miskin. Sekitar 78% responden menyatakan bahwa bantuan tersebut membantu mencukupi kebutuhan pangan selama 7–10 hari dalam satu bulan. Namun, sisanya merasa bahwa nilai bantuan Rp200.000 per bulan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara optimal, terutama bagi rumah tangga dengan jumlah anggota lebih dari empat orang. Hal ini menandakan perlunya peninjauan ulang terhadap jumlah bantuan agar lebih kontekstual dengan kondisi lapangan, termasuk harga bahan pangan yang terus berfluktuasi. Dalam hal pemerataan distribusi manfaat, ditemukan bahwa terdapat kelompok fakir miskin yang belum terdata dalam DTKS karena persoalan administratif seperti tidak memiliki KTP, berpindah domisili, atau belum pernah terdaftar sebagai peserta program pemerintah lainnya. Sebaliknya, ada pula sejumlah KPM yang secara ekonomi sudah relatif mapan namun tetap terdaftar sebagai penerima BPNT karena belum dilakukan pemutakhiran data secara berkala. Ketidaksesuaian data ini menimbulkan eksklusi dan inklusi yang salah dan mengurangi ketepatan program secara keseluruhan.

Dari perspektif responsivitas, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah melalui program ini, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas ketika terjadi masalah, seperti keterlambatan pengisian saldo atau kualitas komoditas yang buruk. Hal ini menandakan perlunya penguatan sistem pengaduan dan layanan pelanggan dalam program BPNT agar keluhan masyarakat dapat segera ditangani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BPNT di Kota Banjarbaru telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan literasi keuangan di kalangan KPM. Namun, masih diperlukan perbaikan pada aspek ketepatan sasaran, pemerataan layanan, kualitas pendampingan sosial, serta pembaruan data yang lebih akurat dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa

BPNT belum sepenuhnya optimal dalam menangani fakir miskin secara menyeluruh, dan program ini perlu didesain ulang agar tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif, yakni memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari ketergantungan bantuan.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas negara untuk menjawab persoalan-persoalan yang dianggap menjadi perhatian publik (Ramadannisa, 2023). Dalam hal ini, program BPNT hadir sebagai bentuk respon negara terhadap permasalahan kemiskinan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin dan fakir miskin. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, negara bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok yang hidup dalam keterbatasan ekstrem, termasuk kebutuhan pokok berupa makanan. Oleh karena itu, pembahasan terhadap efektivitas program BPNT tidak dapat dilepaskan dari konteks besar mengenai hak sosial warga negara dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar tersebut.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, efektivitas kebijakan mencerminkan sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan dapat dicapai dalam kondisi nyata (Dunn, 2015). Dalam konteks BPNT di Kota Banjarbaru, efektivitasnya dapat dilihat dari pencapaian sasaran, ketersediaan bantuan, penerimaan oleh masyarakat, dan perubahan kondisi KPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program ini telah menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam kategori fakir miskin, dengan tingkat ketercapaian verifikasi mencapai lebih dari 85% di sebagian besar wilayah kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan dan distribusi, kebijakan telah menunjukkan keberhasilan dalam menjawab kebutuhan pangan dasar kelompok miskin ekstrem. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemukan sejumlah masalah seperti keterlambatan distribusi, kualitas komoditas yang bervariasi, serta inklusi dan eksklusi yang salah dalam penetapan data KPM.

Efisiensi kebijakan, dalam perspektif Dunn, merujuk pada perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan output yang dihasilkan. BPNT sebagai program berbasis non tunai sebenarnya dirancang untuk mengurangi inefisiensi dalam bentuk kebocoran, penyaluran tidak tepat, dan keterlambatan distribusi yang sering terjadi dalam program bantuan pangan sebelumnya seperti Raskin. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kartu elektronik dan sistem e-warong telah meningkatkan efisiensi dari sisi operasional dan pelaporan transaksi. Tingkat penggunaan sistem e-warong yang mencapai lebih dari 90% menunjukkan bahwa KPM mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut. Namun, efisiensi kebijakan juga dapat dikritisi dari sisi biaya sosial, seperti ketergantungan pada satu penyedia e-warong, terbatasnya pilihan bahan pangan, dan kurangnya literasi digital di kalangan KPM tertentu. Maka, meskipun efisiensi administratif meningkat, efisiensi sosial masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kecukupan kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dasar dari sasaran kebijakan. BPNT di Kota Banjarbaru memberikan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan untuk pembelian bahan pangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tujuh hingga sepuluh hari. Hal ini berarti bahwa secara

nominal, bantuan tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pangan satu rumah tangga selama satu bulan. Dengan demikian, dalam perspektif kecukupan, kebijakan ini bersifat parsial dan belum menjamin ketahanan pangan secara menyeluruh bagi KPM. Oleh karena itu, perlu pertimbangan penyesuaian nilai bantuan berdasarkan kondisi ekonomi lokal, fluktuasi harga pangan, dan ukuran rumah tangga.

Dimensi pemerataan kebijakan berhubungan dengan sejauh mana kebijakan dapat mendistribusikan manfaat secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPNT telah menjangkau sebagian besar KPM terverifikasi, masih terdapat kelompok fakir miskin yang terlewatkan akibat keterbatasan data dan verifikasi administratif. Masalah seperti ketiadaan identitas kependudukan, perpindahan domisili, atau ketidakikutsertaan dalam program sosial lainnya menyebabkan beberapa individu atau keluarga miskin tidak tercatat sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, terdapat pula penerima yang secara ekonomi telah membaik tetapi masih menerima bantuan karena belum dilakukan pembaruan data. Ketidakesesuaian ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat program, dan menunjukkan perlunya sistem pembaruan data yang lebih adaptif dan berbasis bukti lapangan. Responsivitas kebijakan merupakan refleksi dari kemampuan pemerintah untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam konteks BPNT, responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah, dinas sosial, dan pelaksana program tanggap terhadap keluhan masyarakat, termasuk masalah teknis seperti keterlambatan saldo masuk, kualitas bahan pangan, dan pelayanan di e-warong. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar KPM merasa terbantu dengan adanya BPNT, tetapi belum mengetahui secara jelas prosedur pengaduan ketika menghadapi masalah. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme umpan balik antara penerima bantuan dan penyelenggara program masih lemah. Sebagai kebijakan publik, BPNT seharusnya memiliki sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan inklusif agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.

Ketepatan kebijakan mengacu pada sejauh mana program benar-benar ditujukan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lebih dari 80% KPM yang menerima BPNT di Kota Banjarbaru telah terverifikasi sebagai fakir miskin, namun masih terdapat kasus ketidaktepatan sasaran yang perlu dievaluasi. Ketepatan kebijakan sangat dipengaruhi oleh keandalan data DTKS yang menjadi acuan utama penetapan KPM. Jika data tidak diperbarui secara berkala atau tidak mencerminkan kondisi riil, maka akan terjadi salah sasaran baik dalam bentuk eksklusi maupun inklusi. Dalam hal ini, peran pendamping sosial menjadi sangat penting untuk melakukan validasi lapangan dan memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pendamping sosial bekerja dalam beban kerja yang sangat tinggi, dengan rasio pendamping terhadap KPM yang tidak seimbang, sehingga proses validasi dan pengawasan menjadi kurang optimal. Jika ditinjau dari perspektif pembangunan sosial, program BPNT masih menempatkan masyarakat miskin sebagai objek bantuan yang pasif. Hal ini sejalan dengan kritik dari Amartya Sen yang menyatakan bahwa kebijakan sosial yang efektif harus berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu, bukan hanya pemberian bantuan langsung.

Oleh karena itu, meskipun BPNT memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk ketersediaan pangan, program ini belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kemandirian KPM. Tidak adanya integrasi antara BPNT dengan pelatihan



keterampilan, penguatan ekonomi rumah tangga, atau akses pembiayaan mikro menunjukkan bahwa kebijakan ini masih bersifat karitatif dan belum transformasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ketergantungan pada bantuan dan menghambat proses keluar dari kemiskinan secara struktural. Kaitan antara hasil penelitian ini dan kebijakan publik lokal juga penting untuk dikaji. Sebagai kota berkembang, Banjarbaru memiliki potensi sumber daya dan dukungan politik yang cukup untuk menjalankan program sosial yang lebih komprehensif. Namun, jika BPNT tidak dibarengi dengan kebijakan komplementer seperti pelatihan kerja, dukungan UMKM, atau program kesehatan masyarakat miskin, maka dampaknya akan terbatas. Pembahasan ini mengarah pada perlunya pengembangan model kebijakan sosial integratif yang menggabungkan aspek perlindungan sosial dengan strategi pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan publik yang tidak didasarkan pada data yang akurat dan proses implementasi yang adaptif akan menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuannya. Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier juga menekankan pentingnya tiga komponen utama yaitu kejelasan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, dan dukungan dari aktor pelaksana. Ketiga elemen ini belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan BPNT di Kota Banjarbaru, sebagaimana terlihat dari masih lemahnya pemutakhiran data, keterbatasan kapasitas pendamping, serta ketimpangan dalam pengawasan *e-warong*. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi harus mencakup analisis sosial yang komprehensif. Program BPNT di Kota Banjarbaru telah mencapai sejumlah kemajuan terutama dalam aspek digitalisasi penyaluran dan perluasan jangkauan penerima, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengangkat posisi sosial-ekonomi fakir miskin secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini mencakup penguatan kapasitas pendamping sosial, pembaruan data secara berkala, pengawasan terhadap *e-warong*, serta integrasi program BPNT dengan program pemberdayaan lainnya agar manfaatnya tidak hanya jangka pendek tetapi berkelanjutan dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan fakir miskin di Kota Banjarbaru, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban pengeluaran pangan masyarakat miskin ekstrem, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Secara umum, BPNT telah menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu fakir miskin, dengan tingkat verifikasi yang cukup tinggi di beberapa kelurahan. Implementasi sistem non tunai melalui *e-warong* telah meningkatkan efisiensi distribusi bantuan dan mendukung literasi keuangan dasar di kalangan keluarga penerima manfaat. Namun, dari sisi efektivitas dan ketepatan sasaran, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerima, seperti kasus eksklusi terhadap kelompok miskin yang belum terdaftar dalam DTKS dan inklusi terhadap penerima yang secara ekonomi sudah tidak layak menerima bantuan. Selain itu, kualitas komoditas pangan dan keterlambatan pencairan dana juga menjadi persoalan teknis yang berpengaruh terhadap kepuasan penerima bantuan. Peran pendamping sosial yang sangat krusial dalam proses

verifikasi dan edukasi kepada KPM masih terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas teknis. Program ini juga belum terintegrasi dengan intervensi pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, sehingga manfaatnya cenderung bersifat jangka pendek dan belum mampu secara signifikan mendorong kemandirian penerima. Dalam konteks ini, kebijakan BPNT perlu ditinjau dan diperkuat secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, BPNT tidak hanya menjadi instrumen distribusi pangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komprehensif pengentasan kemiskinan yang lebih berdampak, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO. *Publika*, 175–190. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p175-190>
- Aspar, A., M, S., & Dn, S. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR. *Washiyah : Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), Article 2. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/14522>
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *GOVERNANCE*, 1(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844>
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315663012>
- Firdaus, A., Sujianto, & Yuliani, F. (2022). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis: Suatu Evaluasi. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.36>
- Firdausi, D. S., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323>
- Harati, R. (2025). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POPULATION NUMBER AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON POVERTY IN THE CITY OF PALANGKARAYA. *Multifinance*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.61397/mfc.v2i3.340>
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>

- Irawan, D. (2021). EVALUASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DESA PULAU ARO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *JUHANPERAK*, 2(2), Article 2.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Laloan, I. A., Kairupan, S. B., & Langkai, J. (2021). Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36412/jan.v2i2.2510>
- Murzha, Z. S., & Saraan, M. I. K. (2025). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.17702>
- Nauval, M. (220632013497), & Suparti, H. (2024). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong* [Other, SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI TABALONG]. <https://repository.stiatabalong.ac.id/id/eprint/143/>
- Ningtyas, A. (2023). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Gedung Johor* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21293>
- Ogot, R. S., Pramono, S., & Widyawati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 179–188.
- Purnama, I. N., Hasanah, B., & Sururi, A. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN SOSIAL (STUDI PADA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA SERANG). *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.33558/akp.v13i1.7338>
- Putri, A. D. (2023). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Kecamatan Rumbai Timur Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru* [Diploma, Universitas Lancang Kuning]. <https://repository.unilak.ac.id/3371/>
- Putri, A. E., Agusiady, R., Susanto, B., & Ratnawati, A. (2025). THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY AND LOCUS OF CONTROL ON FINANCIAL BEHAVIOR ON STUDENTS OF UNIVERSITAS SANGGA BUANA INSTITUTIONS. *Multifinance*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.61397/mfc.v2i3.342>
- Ramadannisa, C. A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. *Academia Praja : Jurnal Ilmu*

- Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 6(1), 109–128.  
<https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1164>
- Setiawan, A., Limakrisna, N., & Warsindah, L. (2025). THE ROLE OF WORKPLACE SPIRITUALITY ON EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH ORGANIZATIONAL COMMITMENT. *Multifinance*, 2(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.61397/mfc.v2i3.347>
- Soeratin, H. Z., & Mayuri, N. K. L. (2025). BIBLIOMETRIC METHOD AS A TOOL TO PREVENT FRAUD IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT: A STUDY OF STRATEGIES, CHALLENGES, AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL MANAGEMENT. *Multifinance*, 2(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.61397/mfc.v2i3.350>
- Supiani, S., Setiawati, B., & Suryani, L. (2020). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA E-WARONG DI DESA HARUS KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 3(2), Article 2.
- Tjilen, A. P. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Deepublish.
- Yana, D., Kustiawan, K., & Winarti, N. (2022). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG* [Masters, Universitas Maritim Raja Ali Haji].  
[https://doi.org/10/DESVIKA%20YANA\\_180565201028\\_Ilmu%20Pemerintahan\\_Cover.pdf](https://doi.org/10/DESVIKA%20YANA_180565201028_Ilmu%20Pemerintahan_Cover.pdf)